



Photo: Unsplash

Kepala LPEM FEB UI

Riatu Mariatul Qibthiyah, S.E., MA., Ph.D.

Pimpinan Redaksi

Dr. Alin Halimatussadiah

Redaktur Pelaksana

Assyifa Szami Iman, S.E

Giani Raras, S.E

Calista Endrina Dewi, S.E

Editor

Nismara Paramayoga

Firli Wulansari Wahyuputri



Scan untuk mengetahui informasi tentang LPEM lebih lanjut

Selamat datang di LPEM Newsletter Edisi Agustus 2021. LPEM Newsletter merupakan buah pemikiran dan rangkuman kegiatan tim LPEM FEB UI. Edisi ini merupakan keluaran keenam dan senantiasa akan diterbitkan setiap bulannya. Sejak 1953, LPEM FEB UI secara aktif telah melakukan kegiatan penelitian, konsultasi, dan pelatihan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah pembangunan di Indonesia.

Pada edisi kali ini, terdapat beberapa studi yang dipaparkan oleh peneliti LPEM FEB UI dalam kegiatan The 16th IRSA International Conference dengan fokus pembahasan isu **"Dampak Pandemi terhadap Perekonomian Rumah Tangga"** dan **"Dampak Pandemi terhadap Konsumsi Energi"**. Selain itu, edisi kali ini juga akan membahas diskusi yang mengundang Peneliti LPEM FEB UI, seperti diskusi menjadi narasumber dalam diskusi podcast mengenai **"Menilik Anggaran Daerah di Masa Pandemi"**, menjadi pembicara webinar dengan membawa topik **"Mengukur Kekayaan Negara Pasca Pandemi COVID-19"**, dan menjadi narasumber dalam Rapat Dengar Pendapat DPR RI dengan membawa topik **"Mendorong Perbaikan Kebijakan Perpajakan dalam RUU KUP"**. Terakhir, edisi ini akan menyampaikan kontribusi terkini LPEM FEB UI melalui Jurnal Economics and Finance Indonesia dalam mendiseminasi naskah akademik di beberapa kegiatan konferensi ilmiah.

Selamat membaca,

Alin Halimatussadiah

Ketua Kelompok Kajian Ekonomi Lingkungan
LPEM FEB UI



FEUI.LPEM



lpemfebui



LPEMFEBUI



LPEM FEB UI



marcom@lpem-feui.org

Masyarakat Berstatus Ekonomi Rendah Terdampak Pandemi Lebih Parah

Peneliti LPEM FEB UI, Chairina Hanum Siregar dan Lovina Aisha, mempresentasikan hasil studi berjudul **"Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pengeluaran Rumah Tangga, Pendapatan, dan Ketahanan: Temuan Empiris dari Indonesia"** pada kegiatan "The 16th IRSA International Conference" yang mengusung tema "Institusi, Sumber Daya Manusia, dan Pembangunan" di FEB UGM pada 12—13 Juli 2021.

Dengan memanfaatkan data primer dari survei LPEM FEB UI yang telah dilaksanakan pada Agustus—September 2020, studi ini menemukan bahwa orang dengan kondisi ekonomi yang lebih tinggi dan usia lebih tua cenderung memiliki pendapatan dan pengeluaran yang relatif stabil atau meningkat pada masa pandemi COVID-19. Di sisi lain, individu dengan tingkat sosial ekonomi yang lebih rendah dengan pekerjaan di sektor yang terdampak parah mengalami pengurangan pendapatan dan pengeluaran pada masa pandemi COVID-19. Cara bertahan antar kelompok individu pada masa pandemi COVID-19 juga berbeda, di mana orang dengan pekerjaan yang stabil dan kepemilikan aset yang lebih tinggi memiliki beberapa cara bertahan yang positif.



Sebagai penutup, Chairina menyampaikan implikasi dari studi yang dilakukan. "Pertama, bantuan sosial pada masa pandemi COVID-19 penting karena dapat menjadi 'penyangga ekonomi' selama guncangan (akibat) pandemi dan membantu rumah tangga untuk bertahan hidup. Kedua, peningkatan strategi penargetan dan optimalisasi database terpadu juga diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi rumah tangga pada masa pandemi. Terakhir, kebijakan pasar tenaga kerja seperti Kartu Prakerja, subsidi upah (BPJS Ketenagakerjaan), dan subsidi lainnya juga harus dioptimalkan pada masa pandemi." tutup Chairina.

Pandemi Mendorong Masyarakat Lebih Hemat Energi



Peneliti LPEM FEB UI, Wildan Al Kautsar Anky dan Raka Rizky Fadilla mempresentasikan hasil studi berjudul **"Dampak Guncangan Pendapatan Selama Pandemi COVID-19 terhadap Perilaku Konsumsi Energi di Indonesia"** dalam acara "The 16th IRSA International Conference" di FEB UGM pada tanggal 12—13 Juli 2021. Pada tahun ini, The 16th IRSA mengusung tema "Institusi, Sumber Daya Manusia, dan Pembangunan".

Studi tersebut menunjukkan bahwa penurunan pendapatan individu selama pandemi COVID-19 telah menyebabkan

perilaku penggunaan energi yang pro-lingkungan, termasuk penggunaan listrik secara efisien, dan penggunaan peralatan energi yang lebih efisien. Dengan menggunakan analisis inferensial, studi ini menjelaskan bahwa penduduk yang mengalami guncangan pendapatan yang tinggal di daerah PSBB akan cenderung memiliki perilaku hemat energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang juga memiliki guncangan pendapatan tapi tinggal di daerah non-PSBB. Orang-orang menghemat energi seiring dengan tekanan ekonomi yang lebih besar di wilayah yang mengalami PSBB.

Di akhir presentasi, Wildan dan Raka memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam memahami perubahan perilaku masyarakat saat terjadi guncangan penurunan pendapatan, terutama pada masa pandemi. "Pertama, peralihan bahan bakar dan peralatan memasak masyarakat yang hemat energi merupakan sinyal bahwa pemerintah perlu memberikan akses dan harga yang murah bagi masyarakat guna mendorong penghematan energi yang dapat menjaga kelestarian lingkungan," ujar Wildan. Kebijakan yang pro lingkungan diharapkan dapat didorong dengan memanfaatkan momentum yang ada sehingga eksternalitas negatif yang dirasakan oleh lingkungan selama ini dapat diminimalisir. "Kedua, pengurangan konsumsi energi yang terjadi akibat guncangan pendapatan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam memberikan bantuan sosial yang dapat membantu ketersediaan energi di masyarakat selama masa pandemi," tutup Raka.

Podcast: Menilik Anggaran Daerah di Masa Pandemi

Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) bersama dengan Podcast Kanopi on Air pada tanggal 13 Juli 2021 meluncurkan sebuah podcast kolaborasi yang bertajuk **"Menilik Anggaran Daerah di Masa Pandemi COVID-19, Apa Kata Riset?"**. Dipandu oleh Tantra Tanjaya dan Devan Hadrian (Kanopi FEB UI) sebagai hos, Fachry Abdul Razak Afifi (Asisten Peneliti LPEM FEB UI) berbicara mengenai dampak COVID-19 terhadap perekonomian daerah.

Fachry mengawali podcast dengan fakta bahwa Indonesia tengah dilanda sebuah krisis kesehatan yang disebabkan oleh Pandemi COVID-19. Hal tersebut telah menghambat mobilitas masyarakat sehingga mengakibatkan kontraksi ekonomi sebesar 2,07%. Imbasnya, terjadi penurunan pendapatan pemerintah di saat mereka membutuhkan anggaran tambahan untuk menyediakan program kesehatan dan perlindungan sosial. Namun, situasi yang dihadapi oleh pemerintah daerah lebih sulit karena anggaran yang ditransfer dari pemerintah pusat berkurang karena kanal pendapatan yang relatif sempit.



Menghadapi hal ini, daerah dengan ketergantungan yang tinggi pada transfer antar pemerintah berjuang untuk menerapkan kebijakan fiskal mitigasi *counter-cyclical*. Selain itu Fachry juga menyampaikan bahwa daerah-daerah dengan pendapatan asli daerah yang relatif tinggi adalah mereka yang menderita lebih parah selama krisis karena aktivitas ekonomi yang lesu memukul pendapatannya dan secara tidak langsung menyebabkan ruang fiskal yang lebih rendah.

Selengkapnya:

<https://spoti.fi/2W65dgP>

Reformasi Perpajakan Perlu Fokus pada Perbaikan Administrasi dan Timing yang Tepat



Komisi XI DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat mengenai RUU KUP dengan menghadirkan beberapa narasumber, salah satunya adalah Christine Tjen, Dosen FEB UI dan juga Wakil Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan LPEM FEB UI. Dalam rapat tersebut, Christine memaparkan masukan atas proposal RUU KUP dengan fokus membahas usulan secara umum, peraturan mengenai Pajak Penghasilan (PPH), peraturan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), timing pelaksanaan kebijakan, dan meninjau ulang terminologi RUU KUP itu sendiri.

Christine berpendapat bahwa proposal RUU KUP bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah melalui beberapa perubahan aturan perpajakan. Dari aspek penyesuaian tarif PPN, walaupun kemungkinan dapat meningkatkan penerimaan, Christine mengingatkan bahwa dalam jangka menengah berpotensi menurunkan tingkat konsumsi, terutama apabila terdapat **overshifting** ke tingkat harga barang, dari peningkatan tarif PPN tersebut. Ia juga menambahkan bahwa pemberlakuan multi-tarif dapat berpotensi menimbulkan inefisiensi.

Christine menyampaikan bahwa reformasi perpajakan yang dirancang dalam RUU KUP perlu mengedepankan perbaikan kebijakan dan administrasi perpajakan. "Perlu tetap untuk membuat sistem pajak yang **simple**, untuk menghindari biaya administrasi dan **compliance** yang lebih besar, serta mengurangi inefisiensi yang kemungkinan muncul dari sistem pajak yang kompleks karena adanya potensi penghindaran pajak yang lebih besar." ujar Christine. Terakhir, **Christine** menyarankan untuk pemerintah dan DPR dapat mempertimbangkan waktu yang tepat dalam mengimplementasi RUU KUP dengan mempertimbangkan situasi perekonomian dan juga kondisi masyarakat. "Apakah tepat jika diimplementasikan di tahun 2022 atau mungkin sebaiknya diundur ke tahun 2023? Sebaiknya keputusan tersebut perlu dipikirkan secara matang." tutup Christine.

Selengkapnya:

<https://youtu.be/WO1Wy61aZxQ?t=8543>

Indonesia Perlu Pertimbangkan Ulang Cara Mengukur Kekayaan Negara Pasca Pandemi COVID-19



Reflections on the urgency of wealth enrichment in post COVID-19: Perspectives from Indonesia

Dr. Alin Halimatussadiyah
Head of Environmental Economics Research Group
Institute for Economic and Social Research
Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia
HLPF, 12 July 2021



International Institute for Sustainable Development (IISD) menyelenggarakan webinar yang bertemakan **"Building Post-Covid Recovery Around Wealth Rather than GDP"** pada 11 Juli 2021. Webinar tersebut merupakan rangkaian acara dari "High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development" yang diselenggarakan oleh PBB bekerjasama dengan berbagai institusi termasuk IISD. Mewakili Universitas Indonesia, Dr. Alin Halimatussadiyah hadir sebagai salah satu pembicara untuk topik **"Reflections on the Urgency of Wealth Enrichment in Post-COVID-19 Era: Perspectives from Indonesia"**.

Webinar ini membahas pentingnya melihat indikator kekayaan suatu negara secara inklusif dan komprehensif (**inclusive/comprehensive wealth**) untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kekayaan diukur dengan melihat seberapa banyak modal yang ada dalam negara

tersebut. Dalam hal ini, modal yang perlu diakumulasi bukan hanya modal produksi (*produced capital*), tetapi juga jenis modal lain yaitu modal sumber daya alam/SDA (*natural capital*), modal manusia (*human capital*), dan modal sosial (*social capital*).

Dalam paparannya, Alin menjelaskan bagaimana pandemi COVID-19 berpotensi menurunkan nilai **inclusive wealth** di Indonesia. "Dari perhitungan *produced capital* yang dilakukan, terlihat bahwa akumulasi modal lebih terkonsentrasi pada sektor konstruksi dibandingkan ke sektor yang lebih produktif, seperti peralatan dan mesin yang erat kaitannya dengan sektor manufaktur. Di tengah situasi COVID-19, investasi pada **produced capital** yang terhambat akan semakin menurunkan kapasitas perekonomian dalam memproduksi output." ujar Alin.

Dari sisi natural capital, Alin berpendapat bahwa tantangan utama di Indonesia di sisi ini adalah menjaga agar kuantitas SDA dan kualitas lingkungan tetap terjaga sehingga dapat mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan. Ia menyarankan perlunya mengevaluasi sektor pemicu deforestasi seperti pertanian dan pertambangan karena idealnya pembangunan ekonomi tidak menghasilkan *trade-off* terhadap lingkungan, bahkan perlu diusahakan agar seiring sejalan.

Terakhir dari sisi modal manusia, Alin berpendapat bahwa pandemi berpotensi menurunkan modal manusia di Indonesia. Hal ini tercermin dari meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan, disrupsi pada aktivitas pendidikan, meningkatnya ketimpangan terutama dari sisi pemilikan aset privat, dan menurunnya kualitas kesehatan karena polusi. Dampak-dampak ini merupakan sebagian dari hal yang perlu ditangani segera karena peningkatan produktivitas di sektor industri juga sangat memerlukan modal manusia yang berkualitas unggul dan produktif.

Selengkapnya:

<https://bit.ly/3ssBcn6>

Jurnal Economics and Finance Indonesia Sebagai Alternatif Publikasi Artikel Ilmiah di Beberapa Konferensi

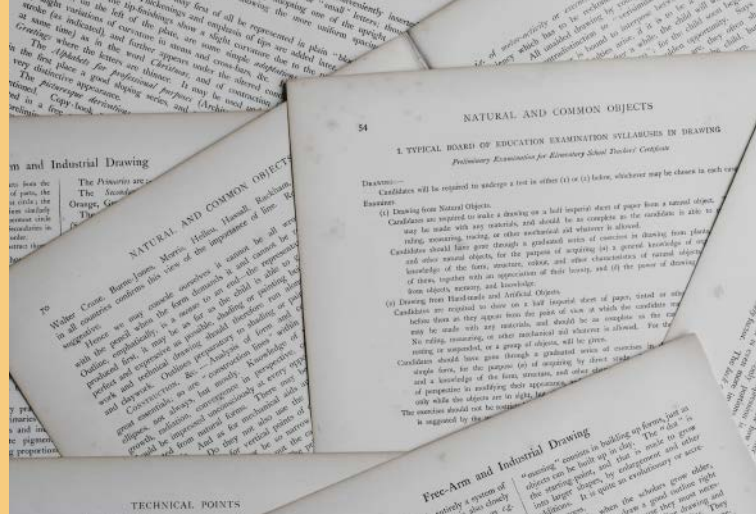
Jurnal Economics and Finance in Indonesia (EFI) merupakan jurnal terindeks SINTA 2 yang telah hadir di dunia akademik Indonesia sejak tahun 1948. Melalui dukungan finansial dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI),

jurnal ini hingga saat ini terus menyediakan wadah untuk publikasi artikel ilmiah atau hasil penelitian tentang perekonomian Indonesia yang berkualitas.

Untuk mendiseminasikan hasil penelitian para ekonom Indonesia kepada pembaca ekonomi internasional yang lebih luas, LPEM FEB UI selanjutnya memutuskan untuk mengubah jurnal tersebut menjadi jurnal **peer-review** yang hanya menerbitkan artikel dalam bahasa Inggris, bernama Economics and Finances in Indonesia (EFI), yang diharapkan dapat menjadi forum yang bermanfaat bagi para ekonom Indonesia dan rekan-rekan mereka di luar negeri dalam melakukan pertukaran pengetahuan.

Sebagai salah satu bentuk keterlibatan dalam diseminasi artikel ilmiah pada tahun 2021, jurnal EFI turut terlibat dalam penerbitan artikel ilmiah yang dipresentasikan pada

dua konferensi: 5th ICIEFI 2021 dan 2nd JESSD Symposium. 5th International Conference on Islamic Economics and Financial Inclusion (ICIEFI) 2021 merupakan konferensi bertemakan "Optimizing the Challenges of Environment, Resources and Socioeconomics for Sustainable Innovation" yang telah diselenggarakan oleh Departemen Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 25—26 Juli 2021 lalu. Selanjutnya, 2nd JESSD Symposium merupakan konferensi yang akan diselenggarakan pada 25—26 September 2021 oleh Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia dengan tema "International Symposium of Earth, Energy, Environmental Science, and Sustainable Development".



Kilas Publikasi dan Kegiatan LPEM FEB UI

Seri Analisis Makro Ekonomi: Analisa Inflasi, Juli 2021
Inflasi pada bulan Maret sebesar 1,37 persen secara **year-on-year**, sedikit melemah dibanding bulan sebelumnya yaitu 1,38 persen. Koreksi pada inflasi umum ini didorong oleh pelemahan yang cukup signifikan pada inflasi inti dari bulan Februari 2021. Pelemahan ini ternyata cukup menutupi penguatan inflasi pada komponen bergejolak yang melonjak dari 1,52 persen pada bulan Februari 2021 menjadi 2,49 persen. Komponen harga diatur pemerintah pun mengalami penguatan inflasi.

Selengkapnya:

<https://www.lpem.org/id/seri-analisis-makroekonomi-inflasi-bulanan-juli-2021/>

Seri Analisis Makro Ekonomi : BI Board of Governors Meeting, Juli 2021

Peningkatan jumlah kasus Covid-19 diperkirakan akan menghambat pemulihan ekonomi. Seluruh indikator ekonomi, seperti inflasi, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), purchasing manager's index (PMI), dan surplus perdagangan, mulai menunjukkan prospek yang suram. Kami memperkirakan indikator-indikator tersebut akan terus mengalami penurunan di bulan Juli.

Selengkapnya:

<https://www.lpem.org/id/macroeconomic-analysis-series-bi-board-of-governor-meeting-july-2021/>

Economic Brief

Seri Analisis Ekonomi : Trade and Industry Brief, Juli 2021

Untuk menekan penyebaran kasus infeksi COVID-19 yang telah mencapai tingkat mengkhawatirkan, pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat selama dua minggu sejak tanggal 3 hingga 20 Juli 2021.

Selengkapnya:

<https://www.lpem.org/id/seri-analisis-ekonomi-trade-and-industry-brief-juli-2021/>

Labor Market Brief, Juli 2021

Pemerintah Indonesia menerapkan PPKM Darurat sebagai respon atas melonjaknya kasus terkonfirmasi positif baru yang meningkat tajam pada akhir kuartal kedua tahun 2021. Penutupan beberapa lokasi usaha dan penyesuaian jam kerja beberapa sektor pekerjaan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pekerjaannya, seperti misalnya pekerja di pusat perbelanjaan (mall/ruko) dan pusat keramaian (bioskop).

Selengkapnya:

<https://www.lpem.org/id/labor-market-brief-%e2%80%9d3-edisi-juli-2021/>

Working Paper: No.61, Juli 2021 How COVID-19 Affects Food Security in Indonesia

Seperti halnya di negara lain, COVID-19 telah memberikan tekanan pada ketahanan pangan Indonesia melalui penurunan pendapatan dan akses yang berkurang, serta peningkatan biaya transaksi dan ketidakpastian sistem pangan negara. Sebelum menilai dampak COVID-19 ini, kami menyoroti beberapa fakta penting tentang sistem pangan Indonesia, termasuk tingginya proporsi konsumen bersih di kalangan petani dan dominasi usaha kecil-menengah informal dalam rantai pasokan.

Selengkapnya:

<https://www.lpem.org/id/how-covid-19-affects-food-security-in-indonesia/>



Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) LPEM FEB UI: Agustus-Desember 2021



Monitoring & Evaluasi
(6-8 September,
6-8 Desember 2021)



Policy Paper
(2-4 Agustus,
15-17 November 2021)



Analisis & Pengolahan Data
(6-10 September 2021)



Pajak Daerah
(11-13 Agustus,
11-13 Oktober 2021)



Ekonometrika
(25-29 Oktober 2021)



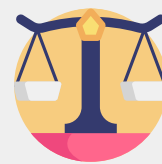
Regulatory Impact Assessment
(4-6 Oktober,
22-24 November 2021)



Analisis Potensi Pajak Daerah
(13-17 September 2021)



Analisis Kebijakan Publik
(26-30 Juli, 8-12 November 2021)



Perencanaan & Penganggaran
(4-8 Oktober 2021)



Computable General Equilibrium
(24-26 Agustus, 6-8 Desember 2021)

Info Diklat

Website : www.diklat.lpem.org
Pendaftaran : <https://linktr.ee/DiklatLPEMFEBUI>
Email : diklat@lpem-feui.org / diklatlpem2021@gmail.com
Whatsapp : <https://wa.me/6281196103130>

Acknowledgement

LPEM Newsletter merupakan inisiatif yang didukung oleh David and Lucile Packard Foundation. Sejak 1964, David and Lucile Packard Foundation telah memberikan hibah dengan tujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat seraya memungkinkan terciptanya kegiatan keilmuan dan perlindungan sistem kehidupan alam. Dukungan dari David and Lucile Packard Foundation tidak hanya dalam produksi newsletter, namun juga rangkaian riset terkait isu ekonomi lingkungan yang dilakukan oleh LPEM FEB UI.